



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



RENJA DPMPTSP T A H U N 2 0 2 5

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Dengan disusunnya Renja-PD maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan Pemerintah kabupaten Luwu.

Belopa, 16 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LUWU,**



Drs. Muhammad Rudi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197404111993021002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP	34
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan	36
2.3.2 Tantangan dan Peluang	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran	49
3.2.1 Tujuan	49
3.2.2 Sasaran	50
3.3 Program dan Kegiatan	51
3.3.1 Program	51
3.3.2 Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
4.1 Sasaran dan Program Kegiatan	60
4.2 Indikator Sasaran Tahun 2025	60
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai tahun 2023	16
Tabel 2.2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja DPMPTSP Triwulan II Tahun 2023	25
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu	32
Tabel 2.3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	37
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Luwu	40
Tabel 3.2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu	51
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu (DPMPTSP) Tahun 2025 memuat program dan kegiatan Tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi serta pelayanan bagi masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan, maka pada Pemerintah Kabupaten Luwu memandang perlu untuk melakukan perubahan susunan organisasi pelaksana pelayanan penanaman modal dan perizinan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu ditetapkan sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Dengan status susunan organisasi kelembagaan yang baru ini maka penanaman

modal merupakan menjadi salah satu tugas pokok, dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sehingga mulai saat ini pelaksanaan urusan ini melekat pada DPMPSTP Kabupaten Luwu yang salah satu tugas prioritasnya adalah percepatan iklim investasi dan iklim usaha yang diamanatkan untuk melaksanakan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, dinyatakan bahwa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Luwu, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan Profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira usaha yang mandiri. Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu yaitu melalui Rencana Strategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Sedangkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran serta Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2019-2025 yang membawa visi sebagai berikut :

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA
DAN MANDIRI DALAM NUANSAL RELIGI “**

Dalam rumusan visi tersebut diatas, penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Maju adalah gambaran tentang terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtera adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Luwu yang meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Mandiri adalah gambaran tentang kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Religi adalah gambaran tentang suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2019- 2025 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional berwibawa, amanah transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah melalui perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam

mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius;

7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan;
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan kondusif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu selaku Aparat pelayanan yang berfungsi melakukan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi pertama dan Kedelapan Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu “

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel
2. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan”

Misi ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kelembagaan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam mengawal pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

LANDASAN HUKUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara

- Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu;
 24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu;
 25. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Nomor 2/SOP Pengaduan-BP3M/X/2014 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu;
 26. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2019-2025.
 27. Peraturan Bupati No : 73 Tahun 2023 Tentang RKPD Kabupaten Luwu 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya RENJA adalah :

1. Untuk menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.
2. Acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.
3. Memberikan gambaran serta acuan terhadap arah kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman

modal sehingga dapat didukung oleh kebijakan sektor lainnya, mengingat masalah pelayanan bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA agar dapat ditetapkannya tahapan- tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat/pelanggan dan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Selain tujuan diatas ada beberapa tujuan lain dalam penyusunan RENJA 2025 ini antara lain :

1. Sebagai Landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya; terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkata Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 serta sumber pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana

BAB.II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Luwu menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Berdasarkan serapan anggaran, hingga triwulan II Tahun 2023 hingga Penyusunan Dokumen Rancangan Renja Tahun 2025 tingkat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Luwu sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan 31 juni 2023, jumlah anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. **4.285.150.314,-** (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Limapuluh Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah), terealisasi hingga Triwulan II sebesar Rp.507.686.539,- (Limaratus Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 43,42 % Berikut ini merupakan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Tahun 2023 Triwulan II Juni 2023, dengan 5 program 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pearangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
 - f) Koordinasi dan Penysunan Laporan Capaian Linerja dan Ikhtisar Realisasi kerja SKPD.
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

II) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1) Penetapan Pemberian fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

- a) Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

III) Program Promosi Penanaman Modal

- 1) Penyelenggaraan dan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota

IV) Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

V) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP s/d Tahun 2023
Kabupaten Luwu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkata Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	12			Penanaman modal									
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100%							
2	18	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	40 Dokumen	8	8	8	100	8	24	60,00
2	18	01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang Disusun	10 Dokumen	2	2	2	100	2	6	60,00

2	18	01	2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokuen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	OB				100,00			100,00
2	18	01	2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	125 OB	25	25	25	100	25	75	60,00

2	18	01	2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	160	OB	32	32	32	100	32	96	60,00
2	18	01	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Periksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	01	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	20	Dokumen	4	4	4	100	4	12	60,00
2	18	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	60	Jenis	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		Jenis				100,00			100,00
2	18	01	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	100	Jenis	20	20	20	100	20	60	60,00
2	18	01	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20	Jenis	4	4	4	100	4	12	60,00

2	18	01	2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggadaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	40	Jenis	8	8	8	100	8	24	60,00
2	18	01	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10	Jenis	2	2	2	100	2	6	60,00
2	18	01	2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	500	Porsi	100	100	100	100	100	300	60,00
2	18	15	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	126 5	Orang/Ke giatan	253	253	253	100	253	759	60,00
2	18	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2.05.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah nulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2.05.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	50	Unit	10	10	10	100	10	30	60,00

2	18	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan jasa Pemeliharaan dan perizinan	50 Unit	10	10	10	100	10	30	60,00
2	18	02		PROGRAM PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan realisasi PMDN	Dokumen							
2	18	02	2,01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Dokumen				100,00			100,00
2	18	02	2,01	Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Dokumen	0	1	0	0	1	1	100,00
2	18	02	2,01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Laporan	0	1	0	0	0	0	0,00
2	18	02	2,01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Cakupan penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten	1 Dokumen							100,00
2	18	02	2,01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0,00

2	18	02	2,01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	0	1	0	0	0	0	0,00
2	18	03		PROGRAM PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Kegiatan				100,00			100,00
2	18	03	2,01	Penyelenggaraa Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten	5 Kegiatan	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	03	2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	5 Kegiatan Pameran	1	1	1	100	1	3	60,00
2	18	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Lama Proses Perizinan Penanaman Modal	Investor				100,00			100,00
2	18	04	2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	Sistem				100,00			100,00

2	18	04	2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Disediakan	7	Sistem	1	1	1	100	2	4	57,14
2	18	04	2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60,00
2	18	04	2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	sistem pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disediakan	10	Layanan	2	2	2	100,00	2	6	60,00
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%					100			100,00
2	18	05	2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	60	Laporan	12	12	12	100,00	12	36	60,00

2	18	05	2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	60	Laporan	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2	18	05	2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	60	Laporan	12	12	12	100,00	12	36	60,00

Belopa, 16 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU,**

Drs. Muhammad Rudi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 197404111993021002



Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra di atas, maka terdapat beberapa yang dapat dijelaskan diantaranya terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan adanya kendala pada tahap pelaksanaan. Jadi pada dasarnya, kegiatan tersebut tetap terlaksana meskipun tidak lagi terukur dalam pencapaian target sesuai renstra yang ada.

Jika mencermati hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan renja sampai Triwulan II Tahun 2023 umumnya telah memenuhi target. Namunpun demikian beberapa program/kegiatan perlu dievaluasi terkait efektifitas pelaksanaannya sehingga dapat mencapai sasaran renstra. Karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya diperlukan langkah inovatif untuk mengoptimalkan pencapaian target dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Langkah inovatif tersebut dapat berupa pendayagunaan sumber daya dan kerjasama operasional dengan berbagai pihak. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Berikut adalah Tabel penelahaan terhadap pencapaian program/ kegiatan yang dilaksanakan sampai Triwulan II pada tahun 2023 :

**Tabel 2.2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU
TRIWULAN II (Dua) TAHUN 2024**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA		REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	KEUANGAN	FISIK	KEUANG AN (%)	FISIK (%)		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			89,24	4,201,485,02 ₈	1,871,752,25 ₉	44,55	12,41	39,76	11,0 ₈		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,61	28,714,560	2,962,954	10,32	12,86	0,06	0,08		
2.18.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,10	4,727,856	0	0,00	0,00	0,00	0	4,727,856	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,10	4,727,856	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	0,07	3,196,420	1,714,954	53,65	45,00	0,04	0.03	1,481,466	

		Dokumen RKA-SKPD										
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,07	3,196,420	1,714,954	53,65	45,00				
2.18.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,06	2,989,480	0	0,00	0,00	0,00	0	2,989,480	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,06	2,989,480	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,07	3,196,420	1,248,000	39,04	45,00	0,03	0.03	1,948,420	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,07	3,196,420	1,248,000	39,04	45,00				
2.18.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	0,05	2,240,040	0	0,00	0,00	0,00	0	2,240,040	

		SKPD										
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,05	2,240,040	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,09	4,107,888	0	0,00	0,00	0,00	0	4,107,888	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,09	4,107,888	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,18	8,256,456	0	0,00	0,00	0,00	0	8,256,456	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,18	8,256,456	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			56,71	2,669,607,817	1,661,469,253	62,24	22,20	35,29	12,59		
2.18.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396 Orang/bulan	55,11	2,594,328,565	1,630,929,253	62,87	60,00	34,64	33.06	963,399,312	

	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			55,11	2,594,328,565	1,630,929,253	62,87	60,00				
2.18.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,41	66,240,000	30,540,000	46,11	51,00	0,65	0.72	35,700,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,41	66,240,000	30,540,000	46,11	51,00				
2.18.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,08	3,595,108	0	0,00	0,00	0,00	0	3,595,108	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,08	3,595,108	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,05	2,215,340	0	0,00	0,00	0,00	0	2,215,340	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,05	2,215,340	0	0,00	0,00				

2.18.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	0,07	3,228,804	0	0,00	0,00	0,00	0	3,228,804	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,07	3,228,804	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,25	11,882,932	3,000,000	25,25	35,00	0,06	0,09		
2.18.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,25	11,882,932	3,000,000	25,25	35,00	0,06	0,09	8,882,932	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,25	11,882,932	3,000,000	25,25	35,00				
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,00	47,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1,00	47,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0	47,000,000	
	Pajak Restoran - Belanja Operasi			0,21	10,000,000		0,00	0,00				

	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Modal			0,79	37,000,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7,35	346,231,995	36,208,570	10,46	5,43	0,77	0,40		
2.18.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,18	8,293,500	0	0,00	0,00	0,00	0	8,293,500	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,18	8,293,500	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,37	17,345,545	0	0,00	0,00	0,00	0	17,345,545	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,37	17,345,545	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,23	10,934,950	0	0,00	0,00	0,00	0	10,934,950	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,23	10,934,950	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,25	11,650,000	0	0,00	0,00	0,00	0	11,650,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,25	11,650,000	0	0,00	0,00				

2.18.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,15	7,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0	7,000,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,15	7,000,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0,21	10,000,000	0	0,00	0,00	0,00	0	10,000,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,21	10,000,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5,97	281,008,000	36,208,570	12,89	38,00	0,77	2.27	244,799,430	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			5,97	281,008,000	36,208,570	12,89	38,00				
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,61	122,869,800	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2,38	112,050,800	0	0,00	0,00	0,00	0	112,050,800	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Modal			2,38	112,050,800	0	0,00	0,00				

2.18.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,23	10,819,000	0	0,00	0,00	0,00	0	10,819,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Modal			0,23	10,819,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17,11	805,288,438	149,087,685	18,51	18,67	3,17	3,19		
2.18.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,33	15,484,558	0	0,00	0,00	0,00	0	15,484,558	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,33	15,484,558	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9,97	469,603,880	69,087,685	14,71	30,00	1,47	2.99	400,516,195	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			9,97	469,603,880	69,087,685	14,71	30,00				
2.18.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,80	320,200,000	80,000,000	24,98	26,00	1,70	1.77	240,200,000	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			6,80	320,200,000	80,000,000	24,98	26,00				

2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,61	169,889,486	19,023,797	11,20	10,00	0,40	0,36		
2.18.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1,69	79,330,966	19,023,797	23,98	30,00	0,40	0.51	60,307,169	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,69	79,330,966	19,023,797	23,98	30,00				
2.18.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	0,21	9,685,000	0	0,00	0,00	0,00	0	9,685,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,21	9,685,000	0	0,00	0,00				
2.18.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,72	80,873,520	0	0,00	0,00	0,00	0	80,873,520	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,72	80,873,520	0	0,00	0,00				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00	0,15	0,28		

2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00	0,15	0,28		
2.18.02.2.01.000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00	0,15	0,28	59,938,000	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			1,42	66,844,000	6,906,000	10,33	20,00				
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00	0,06	0,07		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00	0,06	0,07		
2.18.03.2.01.000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00	0,06	0,07	18,723,400	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,46	21,468,000	2,744,600	12,78	15,00				
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00	0,33	0,32		

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00	0,33	0,32		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00	0,33	0,32	10,784,600	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Belanja Operasi			0,55	26,092,000	15,307,400	58,67	57,00				
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			8,33	391,937,100	6,777,000	1,73	7,44	0,14	0,62		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8,33	391,937,100	6,777,000	1,73	7,44	0,14	0,62		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha.	1,25	58,793,000	2,862,000	4,87	6,30	0,06	0,08	55,931,000	

	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Belanja Operasi			1,25	58,793,000	2,862,000	4,87	6,30				
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000 Pelaku Usaha	4,58	215,557,100	0	0,00	0,00	0,00	0	215,557,100	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Belanja Operasi			4,58	215,557,100	0	0,00	0,00				
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	2,50	117,587,000	3,915,000	3,33	16,02	0,08	0.4	113,672,000	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Belanja Operasi			2,50	117,587,000	3,915,000	3,33	16,02				
JUMLAH				100	4,707,826,128	1,903,487,259			40.43	42.61		

Belopa, 16 Mei 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 197404111993021002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen perizinan dilakukan dalam satu tempat dengan besaran biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu. Adapun jenis izin yang dilimpahkan sebagai berikut :

- I. Persyaratan Ruang :
 - a) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
 - b) Persetujuan lingkungan; dan
 - c) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik fungsi.
- II. Perizinan Berusaha sector :
 - a) Kelautan dan Perikanan
 - b) Pertanian
 - c) Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - d) Perindustrian
 - e) Perdagangan
 - f) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
 - 1. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Milik Daerah
 - 2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan Daerah
 - g) Pariwisata dan
 - h) Ketenagakerjaan
 - i) Dinas Kesehatan, Obat dan Makanan :
 - 1. Surat izin praktek dokter (SIPD)
 - 2. Surat izin praktek apoteker (SIPA)
 - 3. Surat izin perawat tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK)
 - 4. Surat izin praktek perawat (SIPP)
 - 5. Surat izin praktek terapis gigi dan mulut (SIPTGM)
 - 6. Surat izin praktek peñata anastesi (SIPPA)
 - 7. Surat izin kerja fisioterapis (SIKF)

8. Surat Izin Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (SIPPTG)
9. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
10. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
11. Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan (SIKAK)
12. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
13. Surat izin kerja analisis laboratorium (SIKAL)
14. Surat izin praktek tenaga sanitarian (SIPTS)
15. Surat izin praktek radiologi/radiografer (SIPR)
16. Surat izin kerja (SIK) rekam medic dan informasi kesehatan
17. Surat Izin Praktek Tenaga Medik Transfusi Darah (SIPTTDD)
18. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE)
- j). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal (PAUD, SD dan SLTP)
- k). Dinas Perdagangan
 1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
 2. Izin Penyelenggaraan Reklame
 3. Izin toko swalayan
 - 4.. Izin pengelolaan pasar perbelanjaan
 5. Tanda daftar gudang (TDG)
- k). Badan Kesatuan bangsa dan Politik
 1. Izin Penelitian
- III. Izin penyelenggaraan Angkutan Umum :
 - 1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dan barang
 - 2) Kartu pengawasan
- IV. Izin usaha perikanan budi daya (IUP-BD)
- V. Izin usaha budi daya sarang burung wallet
- VI. Izin usaha sarana dan budi daya peternakan :
 - 1) Izin mendirikan rumah potong hewan
 - 2) Izin usaha peternakan
 - 3) Izin usaha pemotongan hewan
 - 4) Izin usaha took obat hewan dan pakan ternak
- VII. Izin lingkungan
- VIII. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)
- IX. Izin pendirian/operasional satuan pendidikan formal :
 - 1) Taman kanak-kanak (TK)

- 2) Sekolah dasar (SD)
 - 3) Sekolah lanjutan tingkat pertama
- X. Izin pendirian/operasional satuan pendidikan non formal (PNF) :
- 1) L K P
 - 2) Kelompok belajar
 - 3) PKBM
 - 4) Majelis taklim
 - 5) Satuan PNF sejenis
- XI. Izin sarana dan prasarana kesehatan :
- 1) Izin klinik (SIK)
 - 2) Izin apotek (SIA)
 - 3) Izin toko obat (SITO)
 - 4) Surat izin operasional rumah sakit (SIORS)
 - 5) Surat izin operasional puskesmas (SIOP)
 - 6) Surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT)
- XII. Izin pengelolaan usaha bidang kesehatan :
- 1) Sertifikat izin produksi rumah tangga (SIPRT)
 - 2) Rekomendasi depot air minum isi ulang
- XIII. Non perizinan penanaman modal :
- 1) Fasilitasi bea masuk atas impor mesin
 - 2) Fasilitasi bea masuk atas impor mesin barang dan bahan
 - 3) Usaha untuk mendapatkan fasilitasi pajak penghasilan (PPh) badan
 - 4) Insentif daerah
 - 5) Layanan informasi dan layanan pengaduan

Target Capaian Kinerja Perangkat Daerah dapat diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi, dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan indikator mandiri yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Luwu, sehingga dapat diukur capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			250.000.000.000	280.000.000.000	310.000.000.000	330.000.000.000	357.626.386.640	336.613.519.168	420.000.000.000	453.000.000.000	
2	Lama Proses Perizinan			1-15 hari	1-10 hari	1-7 hari	1-2 hari	1-5 hari	1-3 hari	2 hari	1 hari	
3	Jumlah Izin yang diselesaikan berdasarkan SOP:											
1	Izin Pemanfaatan Lahan Milik Daerah			15	5	6	7	12	4	5	6	
2	Izin Usaha Kepariwisataaan			70	16	17	18	48	15	16	17	
3	Izin Penyelenggaraan Reklame			5	2	3	4	3	1	2	3	
4	Izin Usaha Jasa Konstruksi IUJK			65	20	21	23	63	49	20	21	
5	Izin Penelitian			400	403	423	424	399	384	403	404	
6	Izin Usaha Toko Modern			5	0	0	0	2	0	0	0	
7	Izin Pendirian/ operasional Satuan Pendidikan Formal/Non Formal			10	21	23	23	8	20	21	22	
8	Izin Lingkungan			30	17	18	19	17	16	17	18	
10	SIUP			1000	1500	1500	1000	756	555	500	500	
12	SIUI			100	150	100	100	75	88	100	150	
14	TDG			20	30	50	10	10	-	5	10	
15	Izin Mendirikan Bangunan			600	600	650	650	533	469	500	550	
16	Izin Trayek			0	0	200	200	0	106	200	250	
17	IOK			0	4	5	6	0	3	4	5	
18	IOP			0	9	10	11	0	8	9	10	
19	SIPA			25	30	31	32	24	28	29	30	
20	SIA			23	20	25	25	23	16	17	18	
21	SITTK			0	0	0	0	0	0	0	0	
22	SIPD			95	96	106	108	91	97	101	102	

23	SIPP			150	151	158	165	145	143	150	157	
24	SIPB			100	210	221	222	100	200	210	211	
25	SIKPA			0	0	0	0	0	0	0	0	
26	SITO			2	10	4	5	2	2	3	4	
27	SPPIRT			16	52	54	55	16	49	51	52	
28	SIPTTK			29	20	21	23	29	19	20	21	
29	SIKRMK			1	3	4	5	1	2	3	4	
30	SIKTLM			0	0	0	0	0	0	0	0	
31	SIORS			0	0	0	0	0	0	0	0	
32	SIPATLM			0	15	16	17	0	14	15	16	
33	SIPDG			0	0	0	0	0	0	0	0	
34	SIPTGM			2	6	7	8	2	5	6	7	
35	SIPPA			2	0	0	0	0	0	0	0	
36	SIPTGZ			0	17	18	19	0	4	5	6	
37	SIPPG			6	5	6	7	6	4	5	6	
38	SIDAMU			2	0	0	0	2	0	0	0	
39	SIKTS			1	0	0	0	0	0	0	0	
40	SIPTS			16	10	11	12	16	9	10	11	
41	SIPF			5	4	5	6	5	3	4	5	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)											

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu di tahun 2021 meliputi investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) dengan realisasi nilai investasi Rp. 336.613.519.168,- sedang di tahun 2022 Triwulan II jumlah realisasi investasi PMA/PMDN dengan nilai investasi Rp. 720.225.545.000,-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Berdasarkan pada uraian permasalahan pada Bab 2.3, maka yang menjadi isu startegis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2019-2025 adalah :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu.

Pemerintah Kabupaten Luwu harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Kabupaten Luwu yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Sulawesi Selatan menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Kabupaten Luwu tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Terkait kemudahan berbisnis,

tertinggal dari Kabupaten lain seperti Kota Palopo, Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian. Kabupaten Luwu memiliki luas 46.000 KM persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Kabupaten Luwu terdapat 2 Pelabuhan Laut dan 1 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu- satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Belopa, Kecamatan Bua. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Luwu sampai saat ini masih menjadi Kabupaten yang rawan terdampak bencana banjir.

2. *Pemerataan Pendapatan bagi warga Kabupaten Luwu.*

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan per kapitawarga Kabupaten Luwu saat ini memang sudah meningkat mencapai 36 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Kabupaten Luwu. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Kabupaten Luwu menjadi Kabupaten yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Sulawesi Selatan (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Kabupaten Luwu masih cukup tinggi sebesar 14,35 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Luwu pada akhir masa periode 5 RPJPD, yaitu 6%.

3. *Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.*

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Kabupaten Luwu, seperti Sulawesi Selatan pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Kabupaten Luwu pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Kabupaten Luwu. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas

sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Kabupaten Luwu saat ini berada di angka 69,50 pada tahun 2018 yang

artinya Kabupaten Luwu berada di peringkat 14 dibandingkan Kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Luwu adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Kabupaten Luwu hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

4. *Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlimpah.*

Kabupaten Luwu diberkahi oleh sumber daya alam yang berlimpah. Kabupaten Luwu sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, karena sejak dulu hasil pangan dari petani kabupaten Luwu sudah berlimpah karena banyaknya sawah dan iklim yang mendukung. Kabupaten Luwu juga memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah, seperti Sejarah, budaya, religi Gua Liang Andulan di Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara, dan Walenrang Barat dan Air Terjun Sarassa di Kecamatan latimojong, dan Wisata Lapandoso di Kecamatan. Namun, sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten Luwu belum termanfaatkan dengan baik. Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani di Kabupaten Luwu. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Kabupaten Luwu adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagaimana tabel tersebut di bawah

Tabel 2.3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Luwu 2. Belum optimalnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan LKPM	1. Belum optimalnya promosi investasi di Kab. Luwu 2. Belum optimalnya pembinaan 3. Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal 4. Potensi dan peluang investasi di Kab. Luwu yang belum siap untuk ditawarkan 5. Belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi di Kab. Luwu
Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan 2. Terbitnya PP 24 tahun 2018 terkait OSS 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan	1. Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis 2. Belum terbitnya semua NSPK dari K/L yang mengacu kepada OSS 3. Belum optimalnya monitoring proses penerbitan izin 4. Sarana mobilisasi untuk visitasi lapangan terbatas

2.3.2 Tantangan dan Peluang

Lingkungan Internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi lembaga dalam menghadapi tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai. Lingkungan Internal

yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada.

1. Analisa Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat;
- 2) Adanya kebijakan dan peraturan penanaman modal yang sangat mendukung peningkatan investasi;
- 3) Adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 4) Terjalannya kerjasama dan komitmen yg terpadu antara komponen yang terkait dengan penanaman modal;
- 5) Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten Luwu yang dapat ditawarkan kepada investor;
- 6) Terdapat potensi subjek dan objek perizinan yang belum memiliki izin dalam lingkungan masyarakat;
- 7) Animo masyarakat terhadap peningkatan pelayanan perizinan.

b. Tantangan (Threats)

- 1) Kurangnya pemahaman dan dukungan Instansi/Unit Kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan;
- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi;
- 3) Kondisi stabilitas nasional yang tidak menentu;
- 4) Masih kurangnya daya dukung infrastruktur dalam mendukung investasi;
- 5) Keberadaan Kabupaten/Kota yang mengeluarkan kebijakan proinvestasi;

2. Analisa Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Tersedianya personel DPMPTSP yang mempunyai motivasi dan etos kerja yang tinggi;
- 2) Adanya peluang Potensi Investasi;
- 3) Adanya Hasil Kajian Pengembangan Investasi;
- 4) Adanya pelimpahan kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya jumlah personil aparaturnya DPMPTSP;
- 2) Belum maksimalnya sosialisasi dan promosi peluang potensi investasi di Kab. Luwu kepada calon investor;
- 3) Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor;
- 4) Belum tersedianya hasil/studi kelayakan usaha (Pra FS/FS) komoditi unggulan;
- 5) Luasnya wilayah kerja Kabupaten Luwu yang tidak dapat dijangkau dalam waktu relatif singkat;
- 6) Belum optimalnya publikasi terhadap pelayanan perizinan;
- 7) Belum tersedianya data potensi subjek dan objek perizinan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program/kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah, akan tetapi kebutuhan dana program/kegiatan akan didanai dengan APBD Kabupaten Luwu. Dapat diperlihatkan pada tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 :

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Luwu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				Rp 5,018,557,945		Rp 4,982,078,074	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 4,370,646,867	100%	Rp 3,903,025,264	
01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Rp 21,536,900	100%	Rp 35,498,470	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang Disusun	2 Dokumen	Rp 2,457,050	2 Dokumen	Rp 3,999,660	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,599,240	1 Dokumen	Rp 3,999,180	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,813,500	1 Dokumen	Rp 3,999,260	

1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,037,700	1 Dokumen	Rp 4,499,760	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,442,980	1 Dokumen	Rp 4,499,760	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 3,419,540	1 Dokumen	Rp 6,000,200	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4 Laporan	Rp 3,766,890	4 Laporan	Rp 8,500,650	
02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	OB	Rp 2,566,979,302	OB	Rp 2,636,508,100	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	24 OB	Rp 2,466,967,352	24 OB	Rp 2,540,000,000	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	32 OB	Rp 83,400,000	32 OB	Rp 84,000,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	Rp 2,987,390	1 Dokumen	Rp 5,500,100	
2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Periksaan	Kab. Luwu	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Dokumen	Rp 2,937,900	1 Dokumen	Rp 3,000,500	

2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	4 Laporan	Rp 10,686,660	4 Laporan	Rp 4,007,500	
03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	12 Laporan	Rp 11,657,320	12 Laporan	Rp 13,500,800	
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	Rp 11,657,320	1 Laporan	Rp 13,500,800	
04.	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Presentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	100%	Rp 85,500,000	100%	Rp 84,500,000	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kab. Luwu	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Laporan	Rp 33,000,000	1 Laporan	Rp 32,000,000	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Luwu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Rp 52,500,000	1 Orang	Rp 52,500,000	
05.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Jenis	Rp 291,181,478	Jenis	Rp 206,388,500	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	Rp 7,659,898	20 Paket	Rp 4,000,000	
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Luwu	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 32,217,565	1 Paket	Rp 2,800,000	

5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	Rp 7,839,735	5 Jenis	Rp 6,588,500	
5.4	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetak dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	Rp 14,214,280	1 Paket	Rp 19,500,000	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 Paket	Rp 15,500,000	1 Paket	Rp 11,000,000	
5.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	10 Kali	Rp 10,000,000	10 Kali	Rp 12,500,000	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Paket	Rp 203,750,000	1 Paket	Rp 150,000,000	
06.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100	Rp 261,681,233	100	Rp 82,500,000	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 261,681,233	1 Paket	Rp 10,000,000	
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Paket	Rp -	1 Paket	Rp 72,500,000	
07.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	100	Rp 968,505,448	100	Rp 773,650,962	

7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	OB	Rp 11,493,854	OB	Rp 12,600,240	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	Rp 609,011,594	12 Bulan	Rp 430,550,722	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Rp 348,000,000	12 bulan	Rp 330,500,000	
08.	'Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu	'Presentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Rp 163,605,186	100	Rp 70,478,432	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	Rp 114,806,006	10 Unit	Rp 65,478,432	
8.2	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit/Set	Rp 48,799,180	Unit/Set	Rp 5,000,000	
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Luwu	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	100%	Rp 84,889,134	100%	Rp 227,750,000	
01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Cakupan Penyelenggaraan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	100%	Rp 84,889,134	100%	Rp 170,500,000	

1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah Perturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	Rp 84,889,134	1 dokumen	Rp 170,500,000	
02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten	100%	Rp -	100%	Rp 57,250,000	
2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp 57,250,000	
III	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Luwu	Nilai Investasi berskala nasional	100%	Rp 88,875,152	100%	Rp 128,325,670	
01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 88,875,152	100%	Rp 128,325,670	
1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	Rp -	1 dokumen	Rp 34,966,150	
1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	Rp 88,875,152	1 dokumen	Rp 93,359,520	
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Lama Proses Perizinan Penanaman Modal	100%	Rp 83,431,920	100%	Rp 148,529,140	
01.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Proses Perizinan Penanaman Modal	100%	Rp 83,431,920	100%	Rp 148,529,140	

1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Luwu	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	2 sistem	Rp 83,431,920	2 sistem	Rp 139,929,140	
1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100 pelaku usaha	Rp -	100 pelaku usaha	Rp 5,600,000	
1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Luwu	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	2 layanan	Rp -	2 layanan	Rp 3,000,000	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp 390,714,872	100%	Rp 564,448,000	
01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	100%	Rp 390,714,872	100%	Rp 564,448,000	
1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Luwu	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha	Rp 57,771,975	2 Kegiatan Usaha	Rp 20,209,900	

1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Luwu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6 laporan	Rp 215,356,383	6 laporan	Rp 400,000,000	DAK NON FISIK
1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Luwu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4 Kegiatan Usaha	Rp 117,586,514	4 laporan	Rp 144,238,100	DAK NON FISIK
VI	Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Luwu	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp -	100%	Rp 10,000,000	
01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu		100%	Rp -	100%	Rp 10,000,000	
1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi secara Elecktronik	Kab. Luwu	Sistem yang disediakan untuk Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi secara Elecktronik	4 laporan	Rp -	4 laporan	Rp 10,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setelah pengimplementasian Sistem Informasi Perencanaan Daerah, Pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarakat umum dapat secara langsung mengusulkan usulan program dan kegiatan untuk perangkat daerah. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota terdapat beberapa usulan langsung kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Luwu. Sebagian besar usulan terkait dukungan pembangunan terhadap pembangunan Mall Pelayanan Publik yang sementara dalam proses Pembangunan dan Re0ncana Grand Opening pada Tahun 2025.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai tahun keempat dari pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang sebelumnya bernama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal periode 2019- 2025, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia , kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut :

- Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;
- Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan “ public service “;
- Tertib administrasi pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu berdasarkan kriteria yang mudah dipahami. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan Nilai Investasi

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai. Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Penjabaran singkat mengenai sasaran dan kegiatan pada masing-masing tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja pada tahun				
				2020	2021	2022	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	CC	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	81,20%	82,12%	83,11%	83,35 %
2.	Meningkatkan Nilai investasi	Meningkatnya Realisasi investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	280	310	420	453	470
			Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (Perusahaan)	357	336	720	-	-

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Program

Program pelaksanaan penanaman modal dan perizinan menyesuaikan dengan program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas.

Rencana program prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- b. Program Promosi Penanaman Modal.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Program Penunjang.

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu untuk tahun 2025 juga didukung dengan program penunjang sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang memiliki dimensi waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Skala Prioritas.

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal.

- b. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota

- c. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/
Kota

2. Kegiatan yang ada pada Program Penunjang.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai DPMPTSP tahun 2025. Target kinerja mempersentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

4.1. Sasaran dan Program Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kab. Luwu merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra maupun kegiatan-kegiatan spesifik Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dalam tahun anggaran 2025 program kegiatan yang dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis.

4.2. Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah atau Instansi/ Lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan dalam lampiran rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu tahun 2025.

Tabel 4.1 **RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		100%	4,467,244,362				3,898,790,845
2	18	1	2		<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu</i>		<i>100%</i>	<i>25,860,431</i>				<i>35,308,867</i>
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Kab. Luwu	2 dokumen	3,436,329	DAU		2 dokumen	4,013,526
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,436,329	DAU		1 dokumen	3,919,498
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,436,329	DAU		1 dokumen	3,907,486
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA- SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,432,360	DAU		1 dokumen	4,193,486
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Kab. Luwu	1 dokumen	3,924,478	DAU		1 dokumen	4,306,236

2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	1 laporan	4,151,978	DAU		1 Laporan	6,279,020
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja PD	Kab. Luwu	4 laporan	4,042,628	DAU		4 laporan	8,689,615
2	18	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu		100%	2,866,540,009				2,893,492,360
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Kab. Luwu	25 OB	2,729,849,558	DAU		396 OB	2,789,004,900
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu	32 OB	116,760,000	DAU		112 OB	91,608,000
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	1 laporan	5,514,165	DAU		1 Laporan	5,852,110
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Kab. Luwu	1 laporan	3,840,780	DAU		1 Laporan	2,849,550
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu	4 laporan	10,575,506	DAU		4 laporan	4,177,800
2	18	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang disediakan		100%	12,743,415				14,311,880
2	18	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Administrasi barang milik Daerah pada perangkat Daerah yang disediakan	Kab. Luwu	1 laporan	12,743,415	DAU		1 kegiatan	14,311,880
2	18	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Pemenuhan Administrasi Perkantoran		100%	256,252,252				172,995,405

2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu	20 paket	4,939,811	DAU		20 paket	4,244,350
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kab. Luwu	1 paket	27,225,925	DAU		1 paket	2,733,060
2	18	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Luwu	5 jenis	8,046,366	DAU		5 jenis	6,979,225
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	Kab. Luwu	1 paket	6,304,150	DAU		1 paket	20,870,520
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Luwu	2 jenis	9,500,000	DAU		2 jenis	11,550,000
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Luwu	1 laporan	5,000,000	DAU		1 Laporan	12,949,750
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Luwu	1 Paket	195,236,000	DAU		1 Laporan	113,668,500
2	18	1	2.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		100%	128,550,138				-
2	18	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Luwu	1 Paket	128,550,138	DAU		1 Paket	Rp 150,000,000
2	18	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah		100%	984,038,396				713,296,058
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Luwu	1 laporan	9,347,189	DAU		1 Laporan	13,320,164
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Luwu	1 laporan	563,091,207	DAU		1 Laporan	343,135,894
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Luwu	12 bulan	411,600,000	DAU		12 bulan	356,840,000
2	18	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	193,259,721	DAU			69,386,275

2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Luwu	10 unit	93,298,701	DAU		10 unit	69,386,275
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Luwu	10 unit	99,961,020	DAU		10 unit	69,386,275
2	18	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN		100%	50,632,655			100%	160,233,700
2	18	2	2		<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten</i>	<i>Cakupan Penyelenggaraan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten</i>		100%	50,632,655				160,233,700
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Luwu	1 dokumen	50,632,655	DAU		1 dokumen	160,233,700
2	18	2	2		<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan Peta Potensi Investasi Kabupaten</i>		50%	-				-
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	Kab. Luwu	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi berskala nasional			61,550,305				54,929,600
2	18	3	2		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</i>		100%	61,550,305	DAU			54,929,600
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	-
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Kab. Luwu	1 dokumen	61,550,305	DAU		1 dokumen	54,929,600
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama Proses Perizinan Penanaman Modal		1-15 investor	58,553,476				49,394,400
2	18	4	2		<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten</i>	<i>Proses Perizinan Penanaman Modal</i>		100%	58,553,476	DAU			49,394,400

2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	Kab. Luwu	2 sistem	58,553,476	DAU		2 sistem	49,394,400
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Luwu	100 pelaku usaha	-	DAU		100 pelaku usaha	-
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	Kab. Luwu	2 layanan	-	DAU		2 layanan	-
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	51,500,778				550,316,800
2	18	5	2		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten</i>		<i>100%</i>	<i>51,500,778</i>	DAU - DAK			<i>550,316,800</i>
2	18	5	2.01	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Luwu	1 Kegiatan	0	DAU		16 laporan	10,876,800
2	18	5	2.01	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemabinaan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Luwu	6 laporan	0	DAK		16 laporan	421,741,100
2	18	5	2.01	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Luwu	4 Kegiatan Usaha	51,500,778	DAU		16 laporan	117,698,900
TOTAL									4,689,481,576	4,863,665,345			

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Non Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat, mudah, transparan, tepat waktu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan.

Perencanaan yang realitas dengan berdasarkan analisis yang mendalam guna mewujudkan Luwu Sejahtera melalui bukti nyata yaitu pelayanan cepat, mudah, transparan, tepat waktu, dan kepastian biaya dan waktu serta bebas KKN. Pelayanan prima yang sudah ditunggu dan sangat diharapkan oleh masyarakat harus dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak yang terkait. Dengan keyakinan yang kuat bahwa perencanaan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga output dan dampak yang diharapkan dapat diwujudkan. Untuk itu upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan pengembangan sarana sesuai tuntutan tugas dan sesuai harapan masyarakat merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda mulai sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Sehingga niat baik untuk mensejahterakan masyarakat dan aparatnya diridhoi dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana kerja ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Belopa, 16 Mei 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU,**



Drs. Muhammad Rudi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197404111993021002